



Media Title	Bisnis Indonesia	
Date	29 Agustus 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	24	Article Size
Journalist	Fitri Sartina Dewi	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

► TOL CINERE-JAGORAWI

Pengelola Lepas Tangan Soal Polemik Lahan

JAKARTA—Pengelola jalan tol Cinere-Jagorawi, PT Translingkar Kita Jaya, menyatakan tidak akan turut campur dalam menyelesaikan persoalan dugaan maladministrasi pembebasan lahan pada proyek jalan tol itu.

Fitri Sartina Dewi
fitri.sartina@bisnis.co.id

Masalah itu mulai berujung kepada rekomendasi Ombudsman RI untuk menghentikan sementara waktu pembangunan proyek ruas jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago).

Sekretaris Perusahaan PT Translingkar Kita Jaya (TLKJ) Sinung Hardjo menolak berkomentar banyak dalam menanggapi dugaan adanya maladministrasi dalam pembebasan lahan tersebut.

Pihaknya lebih memilih untuk menyerahkan dan mempercayakan kepada pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengadaan tanah untuk menuntaskan persoalan tersebut.

"BUJT [badan usaha jalan tol] tidak tahu menahu soal masalah itu karena yang melaksanakan pembebasan tanah itu urusan pemerintah," kata Sinung ketika dihubungi *Bisnis*, Kamis

► Masalah penghentian sementara proyek Cijago sudah diklarifikasi dan dituntaskan oleh pemerintah.

► Masalah dugaan maladministrasi dinilai tak menghambat proses konstruksi dan proses Seksi II berlanjut.

(28/8).

PT TLKJ saat ini mengoperasikan Seksi I tol Cijago yang membentang dari Jagorawi hingga Jalan Raya Bogor sepanjang 3,70 km pada Februari 2012.

Pembangunan tol Cijago merupakan bagian dari *masterplan* prioritas percepatan pembangunan untuk area Jabodetabek yang dilakukan melalui skema pembiayaan *public private partnership* (PPP).

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Achmad Gani Ghazaly menyatakan masalah penghentian sementara proyek tersebut sudah diklarifikasi dan dituntaskan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PU.

Dia mengklaim penghentian sementara pengerjaan proyek jalan tol Cijago sudah dicabut. "Saya mendapat informasi dari Bina Marga bahwa status penghentian sementara pembangunannya sudah dicabut," ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI merekomendasikan penghentian sementara kegiatan fisik pembangunan tol Cijago. Ombudsman merekomendasikan melalui surat bernomor 0522/SRT/0757.2012/PBP-08-50/Tim.5/VII/2014 kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Wali Kota Depok.

Isi rekomendasi surat itu adalah

memberikan sanksi tegas dan pembinaan pada pegawai yang terbukti melakukan tindakan maladministrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rekomendasi dikeluarkan setelah adanya laporan masyarakat Kota Depok soal dugaan adanya maladministrasi dalam proses pembebasan tanah proyek tol.

Ruas tanah milik warga atau pelapor yang dianggap bermasalah adalah di wilayah Kukusan, Kemiri Muka-Beji, Sugutamu-Sukmajaya, Komplek RRI-Jalan Juanda, Komplek Peln, Baktijaya-Sukmajaya Kota Depok, dan area lainnya yang belum mendapatkan penyelesaian ganti rugi sampai dengan selesainya penilaian ulang.

SEKSI II DIKEBUT

Sinung menyatakan masalah dugaan maladministrasi tidak menghambat proses konstruksi dan pihaknya tetap melanjutkan proses konstruksi untuk Seksi II tol Cijago yang membentang dari Jalan Raya Bogor hingga kukusan sepanjang 5,5 km.

"Kami tetap melakukan pengerjaan karena kami ingin mempercepat penyelesaian pengerjaan Seksi II tol Cijago," ujarnya.

Namun, dia menyatakan masalah lahan yang masih belum terhubung menyebabkan laju percepatan pembangunan jalan terhambat. Jalan yang proses konstruksinya sudah dimulai sejak Maret 2014 tersebut, hingga saat ini progress konstruksinya baru mencapai 12%.

"Lahan yang sudah dibebaskan untuk Seksi II memang sudah 90%, tetapi terpencair-pencar. Hal itu cukup mengganggu proses pembangunan," kata Sinung.

Menurutnya, sebagai upaya mem-

percepat proses konstruksi, pihaknya berharap agar pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengadaan lahan bisa segera menuntaskan persoalan pembebasan tanah untuk Seksi II pada tahun ini.

Ini dilakukan agar lahan yang terpencair-pencar tadi bisa segera terhubung. "Proses konstruksi sangat bergantung pada pengadaan tanahnya, tetapi kami targetkan Seksi II ini sudah bisa beroperasi pada September 2015," ujarnya.

Untuk progress tol pada Seksi III, Sinung menyatakan saat ini pihaknya belum memulai proses pengerjaan karena belum ada lahan yang berhasil dibebaskan.

Untuk sementara waktu, ujarnya, Tim Pengadaan Tanah (TPT) dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) selaku wakil pemerintah tengah melakukan sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat untuk membahas mengenai biaya ganti rugi pembebasan tanah.

Dia menjelaskan biaya konstruksi yang telah dikeluarkan untuk konstruksi jalan tol hingga saat ini sudah mencapai Rp550 miliar. Jumlah tersebut masih belum termasuk biaya konstruksi Seksi I (Jagorawi-Raya Bogor) yang telah menghabiskan anggaran Rp475 miliar.

Adapun, untuk biaya pembebasan tanah tol Cinere-Jagorawi yang telah dikeluarkan oleh swasta/BUJT yaitu PT TLKJ sudah mencapai Rp650 miliar, sedangkan untuk biaya pembebasan tanah porsi pemerintah yang sudah dikeluarkan adalah Rp680 miliar. □